

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Radikalisme Agama

Istilah radikalisme mulanya berasal dari Bahasa Latin yaitu “Radix” atau “Radicis” secara etimologi, menurut Bahasa Indonesia radikalisme berasal dari kata radikal dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikal artinya sebagai “secara menyeluruh” atau “habis-habisan” atau “amat keras menuntut perubahan” atau “maju dalam berfikir dan bertindak”.¹

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar.²

Dalam kamus Bahasa Inggris, kata *radical* diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti satu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau *fundamental reform*. Inti dari radikalisme adalah paham radikal yang menghendaki perubahan dengan kecenderungan menggunakan kekerasan. Paham ini sebenarnya merupakan paham politik yang menghendaki

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Luar*, (Semarang: Widya Karya, 2012), h.129

² “Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 3

perubahan yang ekstrem, sesuai dengan pengejawantahan ideologi ang mereka anut.³

Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerarak-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan.⁴

Radikalisme sesungguhnya merupakan konsep yang netral dan tidak bersifat peyoratif (melecehkan). Karena perubahan yang bersifat radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan. Jadi, radikalisme pada dasarnya bermakna netral bahkan dalam studi filsafat jika seseorang mencari kebenaran harus sampai kepada akarnya atau berpikir secara radikal. Namun, ketika radikalisme diarahkan ke wilayah terorisme, maka radikalisme memiliki konotasi negatif.⁵

Radikalisme memiliki makna militansi yang dikaitkan dengan kekerasan yang kemudian dianggap antisosial. Tampaklah makna radikalisme tidak tunggal tetapi bergantung pada konteksnya. Dalam konteks terorisme, maka radikalisme jelas merupakan kekerasan. Namun dalam konteks pemikiran atau gagasan, radikalisme bukan merupakan kekerasan sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tidak diikuti tindak kekerasan.⁶

³ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 47

⁴ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 48

⁵ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 48

⁶ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 49

Sartono Kartodirjo berpendapat bahwa yang dimaksud radikalisme adalah gerakan yang berusaha merombak secara total suatu tatanan politis atau tatanan sosial yang ada dengan jalan kekerasan.⁷

Perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut KH. Hasyim Muzadi, Mantan Ketua Umum PBNU sekaligus pengasuh pesantren al-Hikam Malang, beliau berpendapat pada dasarnya seorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang seharusnya dalam berpikir mesti seperti itu. Katakanlah misalnya, seseorang berpikir Indonesia mengalami banyak masalah dalam hal ekonomi, pendidikan, hukum dan politik itu semua disebabkan karena Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, oleh karena itu misalnya dasar Negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyyah. Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja, sekerasa apapun pernyataan itu jika hanya sebatas wacana dan pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik. Sebab pada hakikatnya apapun yang muncul dalam benak atau pikiran seseorang tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran) karena tidak termasuk tindak pidana. Kejahatan adalah suatu tindakan (omissi). Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.⁸ Namun berbeda halnya apabila sudah ada aksi yang dilakukan dalam rangka misalnya mengganti dasar negara Indonesia karena sudah dianggap gagal dalam membawa kemajuan. Aksi ini baik seperti sosialisasi

⁷ Fananie, Atiqa Sabardila, Dwi Purnanto, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press. 2002), h. 1

⁸ "Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan" (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 4

berupa penyebaran buletin, pengadaan seminar atau pun dengan mengumpulkan masa untuk melakukan demonstrasi.

Adapun term radikalisme KH. Hasyim Muzadi mendefinisikannya “Radikal dalam paham atau ismenya”. Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, force (kekuatan) masyarakat dan terror. Dengan kata lain radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran.⁹ Dalam pandangan penulis, setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal atau radikalisme, tergantung apakah lingkungan mendukungnya atau tidak.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan radikalisasi menurut KH. Hasyim Muzadi adalah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat.¹⁰ Apapun ketidakadilan atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat cenderung akan menimbulkan aksi yang reaktif dari sebagian orang tertentu baik kesenjangan atau ketidakadilan itu terjadi pada sisi ekonomi, sosial, hukum maupun politik. Sebagai contoh kecil adalah kasus baru-baru ini yaitu pernyataan bapak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dianggap sebagai penistaan terhadap kitab suci umat Islam yang berhasil memancing perhatian umat Islam dari berbagai daerah di Nusantara puncaknya tanggal 4 November kemarin yaitu aksi bela Islam yang diadakan di Jakarta. Masyarakat merasa tidak adilnya hukum terhadap pak Ahok yang terkesan lamban sehingga muncul kesenjangan

⁹ “Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 4

¹⁰ “Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 5

dan yang lebih dikhawatirkan adalah takutnya terjadi aksi radikalisme dalam aksi tersebut.

Berbeda lagi pengertian radikalisme menurut Dyah Madya, dalam penelitiannya Dyah memberikan pengertian radikalisme ke dalam dua bentuk yaitu berupa tindakan dan sikap. Pertama, tindakan radikalisme sosial keagamaan, yakni tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai kemanusiaan atas dasar keyakinan agama. Kedua, sikap radikalisme sosial keagamaan, yakni kecenderungan seseorang untuk membenarkan, mendukung dan menoleransi paham atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai kemanusiaan berdasarkan paham agama.¹¹

Sedangkan menurut Syekh Thareq Lahham menyebut radikalisme dengan ekstrimisme. Ekstrimisme merupakan tindakan yang menyalahi syara' yang mengambil posisi yang sangat tajam diantara dua pihak yang saling bertentangan masing-masing keduanya memiliki tujuan merubah suatu kondisi sosial tertentu dengan cara yang bertentangan dengan agama.¹²

Melihat uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan yang dilandasi oleh paham fanatisme terhadap suatu golongan tertentu yang lahir dari sebab terjadinya kesenjangan di masyarakat terutama kaum muslim. Gerakan ini cenderung mengarah kepada jalan kekerasan

¹¹ Dyah Madya Ruth, *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010), h. 7

¹² Syekh Thareq Lahham, *Petualangan Terorisme Dari Pengkafiran Sampai Pengeboman*, (Jakarta: SYAHAMAHA-Press, 2013), h.5

dalam menyikapi kesenjangan yang ada dan memaksakan kehendak terhadap pendapat dan solusi dari pada golongannya dalam menyikapi kesenjangan terutama yang menimpa dunia Islam. Maka dari itu gerakan radikalisme sesungguhnya telah menodai ajaran Islam itu sendiri karena Islam adalah rahmatan lil ‘alamin menebar kedamaian ke seluruh dunia bukan dengan kebencian dan jalan kekerasan.

B. Sejarah Radikalisme Agama

1. Genealogi Radikalisme Agama

Konflik pada internal umat Islam sudah Nampak benih-benihnya pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat saling bersilang pendapat mengenai siapa sosok yang pantas menggantikan posisi Nabi SAW sebagai pemimpin. Meskipun pada akhirnya Abu Bakar as-Shiddiq muncul sebagai sosok yang menggantikan Nabi SAW dan menjadi khalifah pertama namun tetap saja percik-percik penolakan dan kegaduhan terhadap kepemimpinan beliau tetap ada walaupun hanya dari golongan kecil saja. Tongkat estafet kepemimpinan umat Islam terus bergulir, selanjutnya ke tangan khalifah Umar bin Khattab dan perlu diketahui pada kepemimpinan beliau lah umat Islam semakin maju dan tidak terlalu tampak kegaduhan pada umat salah satu faktornya adalah karena beliau tegas, keras, adil tanpa pandang bulu sekaligus bijaksana. Namun pada akhir periode kepemimpinan beliau dengan semakin bertambahnya usia beliau mulai lah tampak pemberontakan-pemberontakan itu puncaknya ketika suatu waktu di waktu shubuh beliau wafat oleh tangannya seorang beragama Islam sendiri yaitu Abu Lulu’ah.

Pasca wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan melanjutkan kendali kekhalifahan sebagai khalifah ketiga. Periode kepemimpinannya tidaklah sepi dari konflik, khalifah Utsman bin Affan oleh sebagian kelompok umat Islam dianggap terlalu lemah sehingga ia mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan kekeluargaan (nepotisme). Berlarut-larut dalam masalah pada akhirnya menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh. Dan estafet kepemimpinan pun terus berlanjut ke pundak Ali bin Abi Thalib yang juga mendapat perlawanan dari beberapa sahabat diantaranya ‘Aisyah, Talhah, Zubair dan Muawiyah.

Perseteraan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pintu gerbang lahirnya konflik yang lebih luas dan melebar antara dua kubu politik ini. Ketika peperangan diantara keduanya hampir pasti dimenangkan oleh kubu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah menawarkan arbitrase. Proses arbitrase ini berhasil dimenangkan oleh kubu Muawiyah yang dinilai memiliki siasat politik yang lebih unggul dibanding kubu Ali bin Abi Thalib. Dampak kekalahan dari proses arbitrase ini menuai kekecewaan bagi pengikut dan pendukung Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada akhirnya melahirkan kelompok Khawarij. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal radikalisme dalam agama Islam.

Kelompok Khawarij tumbuh dan berkembang sebagai kelompok radikal, baik pandangan politiknya maupun pandangan teologisnya. Bagi kelompok Khawarij, baik Ali maupun Muawiyah dianggap telah melakukan dosa besar, sehingga harus dihukumi kafir atau murtad dari agama Islam. Dalam semboyan di setiap argumentasinya adalah “Laa hukma illa lillah” (tiada hukum selain bagi

Allah) atau “Laa hakama illa Allah” (tidak ada hukum selain Allah) sebagaimana tersurat dalam surat Al-maidah ayat 44.¹³

Pada perkembangannya pemikiran ekstrim dan radikal kaum khawarij menjalar bukan hanya ke ranah politik dan teologis saja melainkan menjalar pula ke ranah furu dan lainnya. Sehingga kaum Khawarij berpandangan setiap yang berbeda dan tidak sependapat dengannya maka dia telah musyrik dan halal darahnya.¹⁴

Paham radikal yang diemban kaum Khawarij mendapat reaksi yang tak kalah keras dari kelompok Islam lainnya, mengingat paham Khawarij sangat tidak ramah terhadap perbedaan. Maka, munculah aliran teologi yang lainnya seperti Syi’ah, Murji’ah, Jabariyah, Mu’tazilah, Maturidiyah, Asy’ariah dan yang lainnya.

2. Khawarij Sebagai Cikal Bakal Radikalisme Dalam Islam

Al-Khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan karena kemaksiatan suatu kaum dan mereka membangkang terhadap para pemimpin kaum muslim yang sah serta mayoritas kaum Muslimin.¹⁵ Makna dari Khawarij sendiri adalah keluar yang berarti mengacu pada fakta sejarah bahwa mereka telah keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang setia. Sebutan Khawarij juga meliputi mereka

¹³ “Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 6

¹⁴ Nashir bin Abdul Karim al-Aqli, “Ciri-ciri & Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini” (Jakarta : Darul Haq, 2013) h. 11

¹⁵ Nashir bin Abdul Karim al-Aqli, “Ciri-ciri & Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini” (Jakarta : Darul Haq, 2013) h. 20

yang menganut prinsip-prinsip ajaran dan ideologinya dari Khawarij generasi awal di masa sahabat hingga sekarang. Jadi Khawarij generasi baru di masa modern seperti sekarang bertebaran di berbagai tempat mengemban misi dan pemikiran yang ekstrim dan radikal.¹⁶

Awal mula pertikaian di masa sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. yang mengakibatkan perpecahan dan penyempalan dari jamaah kaum Muslimin dan pemimpinnya terpusat pada dua masalah yang keduanya bermuara pada satu titik yang sama, yaitu “mengkafirkan pelaku dosa besar dan konsekuensinya” dua permasalahan tersebut diantaranya:

Pertama, At-Tahkim (arbitrase). Yaitu, ketika kaum Muslimin sepakat untuk meyerahkan perselisihan kepada dua hakim penengah, yaitu Abu Musa al-Asy’ari dari kubu Ali dan Amr bin al-‘Ash dari kubu Muawiyah, kaum Khawarij melakukan penolakan. Orang pertama yang menolak adalah Urwah bin Jarir, yang mana dia berkata “Apakah kalian akan menyerahkan keputusan hukum dalam masalah agama Allah ini kepada manusia?” Lalu, kalimat ini dianut oleh beberapa kelompok dari kalangan penuntut ilmu yang masih dangkal pengetahuannya, orang-orang Arab badui, para pembunuh Utsaman bin Affan, dan para pengikut Ali lainnya. Mereka menyatakan “Keputusan hukum hanya milik Allah semata.” Kalimat ini pada akhirnya menjadi semboyan mereka, yang dengan ini mereka

¹⁶ Nashir bin Abdul Karim al-Aqli, “Ciri-ciri & Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini” (Jakarta : Darul Haq, 2013) h. 20

memisahkan diri dari pemimpin (Khalifah) yang sah dan dari jamaah kaum Muslimin.

Kedua, mengkafirkan. Maksudnya mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta kedua hakim dan orang yang menyetujui hasil keputusan mereka berdua dengan mengambil makna zahir dari firman Allah yang artinya “Keputusan hukum itu hanya milik Allah” (Al-An’am: 57)¹⁷ dan “Tidak ada hukum selain Allah” (Al-Maidah: 44). Kaum Khawarij memvonis bahwa berdasarkan firman Allah tersebut kubu Ali dan Muawiyah serta orang-orang yang merestui keduanya telah melakukan dosa besar dan pelaku dosa besar adalah kafir dan halal darahnya.

Mereka menyusun seluruh konsekuensi pengkafiran terhadap Ali dan pengikutnya diantaranya adalah bahwasanya ketika keputusan telah diserahkan kepada manusia dalam hal ini Abu Musa al-Asyari, maka Ali tidak lagi mempunyai hak kepemimpinan. Oleh karena, mereka meyakini bahwa mereka sudah terlepas dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan beralih dengan hal tersebut mereka dalam keadaan halal dari pemimpin dan bai’at terhadap Ali. Dan dengan fakta itu pula mereka wajib mengangkat seorang pemimpin untuk mengisi kekosongan yang ada, maksudnya adalah mengangkat pemimpin dari golongan mereka sendiri karena di luar kelompok mereka yaitu orang-orang yang menyetujui dengan adanya arbitrase atau tahkim antara Ali dan Muawiyah adalah telah murtad dari Islam alias kafir.

¹⁷ Nashir bin Abdul Karim al-Aqli, “Ciri-ciri & Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini” (Jakarta : Darul Haq, 2013) h. 24

Maka pada saat itu, mereka membai'at Abdullah bin Wahb ar-Rasibi, pada 10 syawal 37 H. inilah peristiwa pertama perpecahan yang faktual (nyata) dan terang-terangan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam.¹⁸ Konflik antar sekte di dalam tubuh Islam terus berkembang dari zaman ke zaman dimulai dari Khawarij, Syi'ah dan Murji'ah kemudian muncul Jabariyah dan qadariyah dilanjut lagi dengan Mu'tazilah melawan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semuanya sibuk dan larut dalam perdebatan hingga melupakan persatuan dan kesatuan umat Islam.

3. Faktor Munculnya Radikalisme Agama

Mohammed Arkoun (1999), satu diantara sarajana muslim kontemporer, melihat radikalisme Islam sebagai dua tarikan bersebrangan, yakni masalah ideologisasi dan politisi. Dan Islam selalu ada di tengah-tengahnya.¹⁹ Manusia tidak selalu paham sungguh akan perkara itu. Bahwa radikalisme secara serampangan dipahami bagian substansi ajaran Islam. sementara fenomena politik dan ideologi terabaikan. Memahami Islam merupakan aktivitas kesadarn yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme Islam. tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pemikiran manusia. Nyata, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme selama ini hanyalah permainan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam

¹⁸ Nashir bin Abdul Karim al-Aqli, "Ciri-ciri & Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini" (Jakarta : Darul Haq, 2013) h. 25

¹⁹ Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan" (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 9

sejarahinya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik. Radikalisme Indonesia merupakan realitas tarikan bersebrangan itu.²⁰

Dalam dua dekade terakhir ini, selain demokratisasi dan hak-hak asasi manusia (HAM), diskursus yang muncul ke permukaan dalam khasanah politik internasional adalah “kebangkitan” Islam politik, seperti terlihat dari merebaknya fenomena “fundamentalisme” Islam. Dalam sejumlah literature, istilah Islam politik, “fundamentalisme” atau “neo-fundamentalisme” Islam memiliki substansi yang sulit dibedakan satu sama lain. John L. Esposito (1997:1-4) misalnya, menyamakan istilah Islam politik dengan “fundamentalisme Islam”, sementara Oliver Roy (1994) cenderung menafsirkan Islam politik sebagai aktivitas kelompok-kelompok yang meyakini Islam sebagai agama sekaligus ideologi politik. Sedikit berbeda dengan Esposito, Roy merujuk Islam politik pada apa yang ia sebut sebagai gerakan *neofundamentalisme* yang antara lain menghendaki pemberlakuan syariat Islam.²¹ Istilah “fundamentalisme” biasanya dipakai oleh kalangan akademisi maupun media massa untuk merujuk pada gerakan Islam politik yang berkonotasi negatif seperti “radikal, ekstrem, militan serta anti barat/Amerika.”

Gerakan fundamentalisme Islam bermunculan di berbagai belahan dunia terutama di negara-negara timur tengah sebut saja Ikhwanul Muslimin, Hizbut

²⁰ Muhammad Ismaiel, “Radikalisme Islam di Indonesia”, nu.or.id (diunduh tanggal 19 november 2016)

²¹ Afadlal dkk, “Islam Dan Radikalisme Di Indonesia”, (Jakarta : Lipi Press, 2005) h. 53

Tahrir, Hizbulloh dan lain-lain.²² Dan gerakan organisasi ini sedikit banyaknya menurut para pakar adalah gerakan radikal dalam beragama.

Syamsul Bakri, dosen Peradaban Islam STAIN Surakarta, membagi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme ke dalam 5 faktor :

Pertama, faktor sosial-politik. Gejala kekerasan “agama” lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik dari pada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah kaprah oleh barat disebut sebagai radikalisme Islam itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosial-politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Azyumardi Azra memburuknya posisi negara-negara Muslim dalam konflik utara-selatan menjadi pendorong utama munculnya radikalisme. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lainnya ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik.

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentiment keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu terutama yang dianggap musuh umat Islam. tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaanya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut) walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid. Dalam konteks ini yang

²² Afadlal dkk, “Islam Dan Radikalisme Di Indonesia”, (Jakarta : Lipi Press, 2005) h. 55

dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif.

Ketiga, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jarring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural disini adalah sebagaimana anti tesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia.

Barat telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan Muslim sehingga umat Islam semakin terbelakang tertindas. Barat dengan sekularismenya, sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam, juga dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam.

Keempat, faktor ideologis anti westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syari'at Islam. Sehingga symbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syari'at Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kamu radikal

justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban.

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini eliti-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika social yang dilupakan umat.²³

Dari lima uraian tersebut Syamsul Bakri menspesifikasikan beberapa hal yang memicu tumbuhnya radikalisme diantaranya : konflik Palestina-Israel, standar ganda kebijakan negara maju, distorsi paham keagamaan, cita-cita khilafah Islamiyah, ISIS dan fenomena radikalisme modern.

4. Radikalisme Agama Di Nusantara

Radikalisme agama sebenarnya merupakan fenomena yang biasa terjadi di dalam agama manapun. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali ke agama dihalangi oleh situasi sosial-politik yang mengelilingi

²³ "Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan" (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 10

masyarakat. Fenomena ini dapat menumbuhkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antar dua kelompok yang berhadapan.²⁴

Bila dicermati secara mendalam, akar penyebab munculnya radikalisme berpangkal pada ideologi. Walaupun memang faktor ideologi ini tidak berdiri sendiri, ia berdampingan dengan faktor pemicu yang multivariable.

Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme Islam. tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pemikiran manusia. Nyata, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme selama ini hanyalah permainan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam sejarahnya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik. Radikalisme Indonesia merupakan realitas tarikan bersebrangan itu.²⁵

Sejarah panjang konflik sekte dalam Islam memberi pengaruh yang sangat luas dalam perkembangan Islam, termasuk di Nusantara. Abdul A'la, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, memberi gambaran yang cukup luas terkait dengan fenomena radikalisme di Nusantara. Menurutnya hamper semua sejarawan sepakat bahwa penyebaran Islam di kawasan Nusantara (yang nantinya sebagian besar wilayahnya menjadi Indonesia) ditumubuh kembangkan melalui proses dan pola penyebaran secara damai. Penduduk di kepulauan ini pada umumnya menerima dan memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. secara suka

²⁴ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 49

²⁵ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 51

rela, tanpa dilatarbelakangi adanya suatu paksaan yang berarti. Bahkan sampai derajat tertentu, penduduk menyikapi agama yang baru ini sebagai sesuatu yang tidak asing. Pola dan penyebaran Islam secara damai ini menjadi ikon penting Islam di bumi Nusantara.²⁶

Kendati demikian, keberagaman Islam di daerah tertentu tidak berarti seutuhnya berjalan dengan damai dan mulus. Dalam periode tertentu dan di daerah tertentu di Nusantara kekerasan dari kelompok Islam tertentu juga ikut menghiasi wajah keislaman Nusantara. Kelompok awal yang melakukannya adalah gerakan Padri yang melakukan kekerasan bukan hanya terhadap orang di luar agama Islam, tetapi juga terhadap sesama muslim yang tidak mau mengikuti ajaran dan pemahaman mereka. Kekerasan yang terjadi nampaknya bukan semata-mata terjadi secara semerta-merta, tapi merujuk kepada pandangan keagamaan tertentu yang berkelindan dengan aspek lain dan terkonstruksi secara sistematis yang sampai derajat tertentu melegetimasi atas terjadinya sikap dan tindakan semacam itu.²⁷

Pemikiran yang dikembangkan kaum Padri tidak berhenti sebatas pada arah diskursus semata. Mereka melabuhkannya ke dalam realitas kehidupan melalui aksi konkrit. Dalam melakukan tindakan dengan mengatasnamakan agama itu, mereka terperangkap ke dalam fundamentalisme radikal yang berujung

²⁶ Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 7

²⁷ Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 7

kepada kekerasan terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan kaum Padri.²⁸ Itu hanya salah satu contoh radikalisme pertama di Nusantara. Di era modern ini tentu dengan permasalahan yang sangat banyak dan rumit yang terjadi dalam tubuh umat Islam umumnya khususnya negara Indonesia maka banyak sekali tindakan-tindakan yang berbau radikalisme sebagai respon terhadap berbagai masalah tersebut.

Kelompok radikal selalu bersilang pendapat dengan kelompok lain bahkan kelompok nasionalis sekalipun. Banyak agenda makar berhaluan radikal yang terjadi di Indonesia dari masa lampau hingga sekarang ini. Dari awal kemunculan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang dipandang sebagai titik awal gerakan berbasis agama yang pertama kali muncul di Indonesia.

Pada 1965, terjadi pergantian rezim di Indonesia, dari Orde Lama menuju Orde Baru. Pada awalnya terjadi “bulan madu” antara pemerintahan Orde Baru dan kelompok-kelompok Islam yaitu memiliki ancaman yang sama dalam memerangi komunisme yang memang menjadi musuh dari kelompok Islam sejak pra-kemerdekaan. Namun, masa-masa ini tidak berlangsung lama. Ketegangan kelompok Islam dan pemerintahan Orde Baru perlahan-lahan muncul. Terdapat kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru yang mendapat tantangan keras dari kelompok-kelompok Islam, terutama saat penetapan Pancasila sebagai asas

²⁸ Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014) hal. 8

tunggal dan diakuinya aliran kepercayaan dalam GBHN. Peristiwa ini terjadi pada 1970.

Kelompok Islam, baik moderat maupun radikal pada umumnya menentang kebijakan ini. Namun, demikian penentangan ini kemudian ditumpas dengan tangan besi oleh Orde Baru. Terjadilah kontrol yang sangat ketat yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap gerak-gerakan Islam di Indonesia. Rezim Orde Baru berusaha untuk menetralisasi hubungan antara politik dengan agama.

Hal ini tentu saja sangat membatasi gerakan kelompok Islam radikal. Penangkapan demi penangkapan oleh pemerintah kala itu. Namun demikian, gerakan radikal tidak sepenuhnya hilang. Dengan dimotori oleh eks pengikut Kartosuwiryo, kelompok ini bergerak di bawah tanah. Bahkan diikuti oleh kelompok Islam radikal lainnya.

Islam radikal di Indonesia terus mengalami proses perubahan yang berkelanjutan. Tumbangnya rezim Orde Baru membuka pintu bagi mereka untuk membuka gerakan secara lebih laluasa dan terbuka. Jika sebelumnya mereka bergerak sembunyi-sembunyi di bawah tanah, setelah era reformasi mereka lebih berani tampil ke permukaan secara terang-terangan. Ini memang merupakan bagian dari euforia kebebasan yang melanda bangsa ini. Bagi sebagian kalangan, kemunculan mereka dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaaan ideologis, tetapi lantaran diantara mereka menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Kekerasan dalam hal ini tak hanya dalam artian fisik, tetapi juga dalam kekerasan wacana.

Penyebaran paham radikalisme terus bergerak dengan militansi yang tinggi. Pola penyebarannya secara konvensional hingga modern. Kini, kita bisa melihat mulai dari buku, majalah, buletin jumat hingga tautan-tautan yang disebar di sosial media. Semuanya yang terkait dengan pemahan radikalisme mereka sangat mudah ditemui dimana-mana.

Disinilah letak kekuatan radikalisme Islam Indonesia. Semakin melekat dalam setiap segementasi sosial yang tak cepat lekang oleh waktu. Apalagi paham radikalisme ini mulai menjarah ke dunia pendidikan di Indonesia dari mulai sekolah menengah hingga ke perguruan tinggi semua sudah terorganisir dengan baik dan rapih.²⁹

Hampir semua gerakan radikalisme adalah menuntut perubahan. Apa yang biasanya disebut kebangkitan Islam di Indonesia adalah hadirnya gejala-gejala keagamaan yang muncul secara dominan sejak tahun 1980-an yang ditandai dengan menguatnya kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada ajaran agama mereka dengan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kecenderungan ini bisa dikatakan baru karena hal itu tidak muncul di tahun 1960-an sehingga istilah “kebangkitan Islam” baru muncul di awal tahun 1980-an. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kebangkitan Islam ini tidak terbatas hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia Islam. Beberapa pemerintah di negara Timur Tengah, seperti Sudan, Mesir dan yang lainnya yang telah menerapkan kebijakan untuk menerapkan syari’at Islam. Penguatan keagamaan masyarakat Islam ini oleh beberapa ilmuwan sosial disebut dengan

²⁹ Agus SB, “Deradikalisasi Nusantara”, (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 58

istilah-istilah bangkitnya Islam fundamentalis, militan atau revolusioner. Istilah-istilah ini mungkin tidak tepat, terutama bila hal tersebut diartikan secara negatif.³⁰

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa gerakan-gerakan keagamaan yang bisa dimasukkan dalam kebangkitan religiulitas tersebut tidak dimulai di tahun 1970-an. Apa yang terjadi di masa sekarang adalah muncul kesadaran religius di kalangan umat Islam secara nyata. Seperti yang terjadi di kampus-kampus umum atau yang berlatar belakang non-agama, banyak mahasiswi muslim yang memakai jilbab atau dengan maraknya gerakan mahasiswa Islam dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan keagamaan sendiri dalam artinya yang intrinsik sebenarnya telah dimulai jauh sebelum itu. Di Indonesia sendiri ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sejak pada tahun 1912 dan 1936 sebagai gerakan Islam.

Kalau melihat gerakan keagamaan di Indonesia, kita akan menemukan beberapa kesamaan karakter baik dalam gerakan yang baru maupun yang lama. Bisa dikatakan bahwa gerakan Islam yang memunculkan kesadaran ini selalu bersifat responsif. Dengan kata lain, gerakan-gerakan ini diviptakan untuk merespon aspek-aspek tertentu berkaitan dengan kehidupan sosial politik yang bisa mendatangkan konsekuensi religiusitas tertentu. Menurut Amien Rais, hal ini bisa terjadi karena Islam dari sejak kelahirannya bersifat revolusioner seperti bisa dilihat melalui sejarahnya. Kalau revolusi bisa diartikan dan dipahami sebagai perubahan fundamental atau sebagai rekonstruksi sosial dan moralitas masyarakat maka pesan-pesan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7

³⁰ Afadlal dkk, "Islam Dan Radikalisme Di Indonesia", (Jakarta : Lipi Press, 2005), h. 109

merupakan revolusi total yang merubah seluruh dimensi kehidupan manusia saat itu.³¹

Sejatinya Islam radikal terbagi menjadi dua makna, sebagai wacana dan aksi. Radikal dalam wacana diartikan dengan adanya pemikiran untuk mendirikan negara Islam, kekhalifahan Islam, tanpa melalui kekerasan terbuka. Sedangkan dalam level aksi, radikal diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan atas nama agama.³²

Konsep Islam yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia sejatinya harus diarahkan oleh nilai dan norma-norma Islam itu sendiri seperti menghargai, berbuat baik dan menerima perbedaan karena dalam sabda Nabi Muhammad sendiri “Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat” maka dari itu dalam fiqih banyak sekali perbedaan yang diperkarsai oleh Ulama mazhab. Namun, semuanya terjalin dalam harmoni dan damai seperti yang terjadi pada tokoh Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan dan pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari yang membawa misi keislaman sesuai karakternya yang rahmatan lil’alamin. Karena jikalau tidak diarahkan, maka pemahaman agama yang seperti itu akan melibas batas-batas toleransi dan nilai-nilai pluralitas serta menghantam nilai kenusantaraan yang ramah, santun dan bijak sehingga akan terjebak pada pemahaman Islam radikal.

C. Pengertian Nilai

³¹ Afadlal dkk, “Islam Dan Radikalisme Di Indonesia”, (Jakarta : Lipi Press, 2005), h. 110

³² Agus SB, “Deradikalisasi Nusantara”, (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 51

Nilai merupakan satu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran atau standar untuk membuat penilaian dan pemilihan mengenai tindakan dan cita-cita tertentu. Nilai adalah konsep, suatu pembentukan mental yang dirumuskan dari tingkah laku manusia. Nilai adalah persepsi yang sangat penting, baik dan dihargai.³³

D. Peran Guru PAI (Pendidikan Agama Islam)

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjelaskan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.³⁴

Pendidikan Agama Islam memegang peranan yang sangat penting dalam menangkal dan mengontrol tumbuhnya bibit-bibit pemahaman radikalisme pada anak didik. Sebahaya itukah pemahaman radikalisme sehingga harus ditangkal dan dikontrol sejak usia sekolah? Jelas sekali, karena paham radikalisme ini adalah akar dan pondasi dari aksi terorisme. Terorisme tidak akan pernah ada tanpa radikalisme namun radikalisme akan tetap bersemayam meskipun tanpa tindak terorisme. Jadi, bahaya radikalisme sama besarnya dengan bahaya terorisme karena cikal bakal terorisme adalah radikalisme. Karena itulah bibit-bibit radikalisme harus ditangkal dan dikontrol sejak dini.

³³ Mohamad Mustari, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, (LaksBang PRESSindo: Yogyakarta, 2011), h. 104

³⁴ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) h.212-213

Kekhawatirkan kita adalah revolusi selanjutnya dari radikalisme ini, ya benar terorisme. Apakah ada relasi antara radikalisme dan terorisme? Menarik ungkapan Brian Michael Jenkins, "Terorisme tidak jatuh dari langit, mereka muncul dari seperangkat keyakinan yang dipegang kuat. Mereka adalah radikal. Kemudian mereka menjadi teroris."³⁵

Tugas guru dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 27 ayat 3 dikemukakan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas mengajar. Di samping itu, ia mempunyai tugas lain yang bersifat pendukung yaitu membimbing dan mengelola administrasi sekolah. Tiga tugas ini mewujudkan tiga layanan yang harus diberikan oleh guru kepada pelajar dan tiga peranan yang harus dijalankannya. Tiga layanan itu adalah intruksional, bimbingan, administrasi dan adapun tiga peranan guru adalah pengajar, pembimbing, dan administrator kelas. Penulis menggaris bawahi perihal guru sebagai pembimbing yang dimana maksudnya guru mempunyai tugas memberikan bimbingan kepada pelajar dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, sebab proses belajar berkaitan erat dengan berbagai masalah di luar kelas yang sifatnya non-akademis termasuk perihal permasalahan menyangkut pemikiran radikalisme yang tumbuh pada pikiran anak didik.³⁶ Dan tugas guru tersebut haruslah sesuai dengan kode etik guru Indonesia yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang

³⁵ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 59

³⁶ H.M. Suparta, Herry Noer Aly, "Metodologi Pengajaran Agama Islam", (Jakarta : Amisco, 2002), h. 2

berjiwa Pancasila artinya pemikiran radikalisme berbasis agama ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dalam poin kode etik tersebut.³⁷

E. Peran Guru PAI Dalam Menanamkan nilai anti Radikalisme Di Sekolah

1. Memunculkan Kesadaran Pluralitas

Salah satu upaya dalam menangkal pemahaman radikalisme adalah kesadaran akan pluralisme. Karena akar dari radikalisme adalah tidak menerimanya akan perbedaan sehingga cenderung menyalahkan apa-apa yang berbeda dengan dirinya sedang pluralisme adalah berdasarkan Bahasa Latin berasal dari kata *plura* atau *plures* yang berarti banyak, lebih dari satu atau majemuk. Dengan begitu pluralisme adalah paham yang meyakini tentang adanya keberadaan perbedaan yang nyata di masyarakat yang tidak dapat dihilangkan dan dimusnahkan. Kemajemukan tersebut berupa budaya, bahasa, etnis, agama, dan lain-lain.³⁸

Keanekaragaman agama dalam masyarakat, selain mampu mempersatukan individu juga berpotensi memecah belah.³⁹ Pluralisme adalah yang mempersatukan perbedaan tersebut sedang pengklaiman atas kebenaran diri sendiri serta menganggap orang lain salah adalah pemecah belah lebih spesifiknya disebut radikalisme. Yang ingin penulis sampaikan adalah sekolah terutama guru PAI

³⁷ H.M. Suparta, Herry Noer Aly, "Metodologi Pengajaran Agama Islam", (Jakarta : Amisco, 2002), h. 10

³⁸ Dr. Noor Rachmat, MA, "Pengembangan Pluralisme Beragama di Indonesia", (Jakarta : Hegel Pustaka, 2014), h. 33

³⁹ Dr. Noor Rachmat, MA, "Pengembangan Pluralisme Beragama di Indonesia", (Jakarta : Hegel Pustaka, 2014), h. 32

harus mampu menciptakan suasana belajar yang plural dan bernuansa pluralisme artinya menghargai perbedaan yang ada baik pada objek belajar di sekolah ataupun yang berada di luar sekolah guna menangkal berkembangnya bibit radikalisme pada anak didik.

2. Deradikalisasi Pendidikan

Salah satu upaya dalam menangkal paham radikal adalah dengan penanaman akan bahayanya radikalisme di dunia pendidikan baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi yaitu melalui serangkaian kegiatan seperti *public lecture*, workshop, pembelajaran yang kreatif oleh masing-masing guru, pembinaan keagamaan di sekolah serta penanaman akan cinta tanah air dan nasionalisme atau pembinaan wawasan kebangsaan.⁴⁰

⁴⁰ Agus SB, "Deradikalisasi Nusantara", (Jakarta : Daulat Press, 2016), h. 158